



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IX DPR RI**

**(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)**

---

Tahun Sidang : 2024-2025  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke : 14 (empat belas)  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Dengan : Sekretaris Jendral Kemenkes RI, Dirjen Pelayanan Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI dan Dirut Rumah Sakit Vertikal Kemenkes RI  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Rabu, 13 November 2024  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat  
Acara : Membahas Penguatan Fungsi dan Peran Rumah Sakit Vertikal dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan  
Ketua Rapat : Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A./Wakil Ketua Komisi IX DPR RI  
Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI  
Hadir : A. Anggota DPR RI  
33 Dari jumlah 43 Anggota Komisi IX DPR RI  
B. Pemerintah  
- Dirjen Pelayanan Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, beserta jajaran  
- Dirut Rumah Sakit Vertikal, beserta jajaran

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dirjen Pelayanan Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI dan Dirut Rumah Sakit Vertikal dibuka pukul 10.09 WIB setelah memenuhi kuorum sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI melakukan akselerasi pilar transformasi Sistem Kesehatan Nasional guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan dan meningkatkan daya saing rumah sakit vertikal sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan seluruh rumah sakit vertikal berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan dengan memperhatikan masukan Anggota Komisi IX DPR RI, diantaranya sebagai berikut:
  - a. Penguatan ekosistem pelayanan kesehatan rujukan, termasuk manajemen layanan kesehatan, perbaikan tata kelola rumah sakit dan standar produktivitas kinerja spesialis;
  - b. Pemenuhan alat kesehatan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah;
  - c. Memastikan standar pelayanan berjalan maksimal dengan sistem monitoring dan evaluasi yang terukur;
  - d. Penguatan sistem jejaring pengampunan dan peningkatan kapabilitas rumah sakit madya dan rumah sakit utama;
  - e. Memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di rumah sakit vertikal.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan seluruh rumah sakit vertikal untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam sistem pendidikan spesialis, sesuai dengan konstruksi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang sudah memiliki instrumen kuat, termasuk dalam mengatasi perundungan terhadap Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
4. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah mencari solusi dalam mendekatkan akses masyarakat terhadap rumah sakit vertikal, termasuk penyediaan rumah tunggu atau sejenisnya.
5. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota pada rapat hari ini dan disampaikan ke Komisi IX DPR RI paling lambat Rabu, 20 November 2024.

**III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 13 November 2024

**DIRJEN PELAYANAN KESEHATAN LANJUTAN  
KEMENKES RI,**

**KETUA RAPAT,**



Dr. AZHAR JAYA, SKM, MARS



Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.  
A-42